

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus mengalami perkembangan pesat di dunia bisnis. Hal ini dapat terlihat dari semakin beragamnya perusahaan baru yang bermunculan, sehingga persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin intens. Dengan kondisi tersebut, perusahaan diharuskan untuk menggunakan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki secara optimal dan tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu sasaran utama sebuah perusahaan adalah memperbesar nilai perusahaan, yang sering disebut sebagai *firm value*. Nilai ini menunjukkan kinerja serta harapan masa depan perusahaan menurut perspektif investor. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi umumnya menunjukkan potensi pertumbuhan yang positif dan dapat memberikan keuntungan jangka panjang untuk para pemegang sahamnya (Rusli et al., 2020). Sehingga pihak manajemen perlu menerapkan strategi dan kebijakan yang mampu memperkuat keyakinan investor dan pasar terhadap nilai perusahaan.

Nilai sebuah perusahaan bisa dipengaruhi oleh berbagai elemen, di antaranya ada beberapa faktor, salah satunya yang sangat krusial adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG). GCG merupakan suatu sistem untuk memantau dan mengendalikan yang bertujuan untuk menyinkronkan peran berbagai pihak dalam perusahaan, seperti manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Dengan menerapkan GCG secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan tingkat

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan nilai perusahaan di mata investor serta masyarakat luas.

Meskipun prinsip *Good corporate governance* (GCG) telah banyak diadopsi dalam praktik bisnis di Indonesia, implementasinya pada sub-sektor pertambangan batubara masih menghadapi sejumlah tantangan. Sub-sektor memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penyumbang devisa melalui ekspor komoditas maupun sebagai sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, di balik kontribusinya tersebut, industri batubara tidak lepas dari berbagai permasalahan tata kelola, seperti rendahnya transparansi, adanya indikasi praktik korupsi, dan kurang optimalnya pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial serta aspek lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penerapan GCG berpotensi memengaruhi reputasi, keberlanjutan, dan nilai perusahaan. Mengacu pada data dari Bursa Efek Indonesia yang diolah oleh Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (2018), nilai perusahaan subsektor pertambangan batubara yang penilaiannya memakai rasio tobin's Q memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan pada periode 2013 hingga 2017. Di tahun 2013, rata-rata tobin's Q tercatat sebesar 3,11, meningkat menjadi 3,42 pada 2014, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 2,81, dan kembali meningkat menjadi 3,34 pada tahun 2016, serta 3,67 pada tahun 2017. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik terkait lemahnya penerapan prinsip *Good corporate governance* (GCG) adalah skandal yang melibatkan PT Timah Tbk. Perusahaan tersebut terseret dalam kasus korupsi dan perusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali.

Kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip transparansi serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan adanya indikasi potensi kerugian negara hingga mencapai Rp133,6 triliun yang berkaitan dengan buruknya tata kelola di sektor pertambangan batubara. Salah satu indikasi lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas terlihat dari ketidaksesuaian antara data produksi batubara yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di samping itu, kasus pencemaran Sungai Malinau di Kalimantan Utara akibat aktivitas pertambangan batubara juga menunjukkan lemahnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak ekosistem sungai, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Kasus-kasus tersebut menegaskan pentingnya implementasi GCG yang lebih kuat dan konsisten dalam sektor pertambangan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Beragam kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya berperan sebagai landasan etika dalam melaksanakan aktivitas bisnis, tetapi juga sebagai faktor penting yang membantu keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan para investor. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG memiliki tingkat urgensi tinggi serta harus mendapat fokus yang sungguh-sungguh dari seluruh entitas bisnis. Di Indonesia, penerapan GCG telah diatur dalam sejumlah pedoman dan regulasi resmi, seperti pedoman umum *Good corporate governance* yang

disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2015a) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Dalam pedoman tersebut, terdapat lima prinsip utama GCG yang wajib diterapkan oleh setiap perusahaan, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material serta relevan yang disampaikan pada waktu yang sesuai, akurat, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan. Keterbukaan ini tidak sekadar mencakup laporan keuangan, melainkan juga mencakup informasi terkait tata kelola perusahaan, strategi bisnis, risiko usaha, serta kinerja sosial dan lingkungan. Tujuan utama dari transparansi adalah untuk mencegah terjadinya praktik manipulatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berkaitan penegasan atas tugas dan peranan serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dari masing-masing struktur atau unsur perusahaan, seperti direksi, dewan komisaris, serta komite-komite di bawahnya. Dengan sistem akuntabilitas yang baik, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara yang profesional, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip etika serta ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab menuntut perusahaan untuk mengikuti seluruh peraturan hukum dan norma etika saat menjalankan aktivitas usaha. Perusahaan diharapkan tidak hanya meraih keuntungan finansial, tetapi juga memikirkan pengaruh sosial dan lingkungan dari operasional bisnisnya. Pelaksanaan prinsip ini berhubungan erat dengan penerapan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR), yang menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi mengharuskan setiap organ perusahaan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif serta bebas dari intervensi pihak manapun yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Struktur tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan komisaris, komite audit, dan organ terkait lainnya dapat beroperasi secara profesional dan independen demi menjamin objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian internal.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya memberikan perlakuan setara dan adil kepada semua pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya, seperti karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, dan masyarakat umum. Kewajaran mengandung makna bahwa setiap hak harus dihormati dan dipenuhi secara selaras dengan ketentuan hukum dan perjanjian yang berlaku.

Dalam praktiknya, penerapan *Good corporate governance* (GCG) tidak sekadar diukur dari kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar, tetapi juga dilihat dari indikator-indikator spesifik yang merepresentasikan bagaimana prinsip tersebut dijalankan dalam perusahaan. Oleh karena itu, beberapa variabel seperti kualitas audit, frekuensi rapat komite audit, pelaksanaan *Corporate social responsibility* (CSR), kehadiran komisaris independen, dan kepemilikan institusional menjadi fokus utama dalam menilai efektivitas *governance* perusahaan, khususnya pada sektor pertambangan batubara yang memiliki tantangan dan risiko yang cukup kompleks. Pengukuran variabel-variabel ini penting untuk memahami bagaimana praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga keberlanjutan bisnis.

Kualitas audit merupakan salah satu faktor krusial dalam memastikan transparansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit berkaitan dengan sejauh mana auditor mampu menilai, mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan yang ada di laporan keuangan secara objektif dan independen. Audit yang berkualitas tinggi memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi keuangan yang disajikan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Darmawan, 2023), sehingga mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen dan investor. Kualitas audit berperan dalam meningkatkan efisiensi pengendalian internal serta membantu menemukan risiko potensial yang dapat membahayakan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit menjadi ukuran penting untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan dapat menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan perusahaan yang efektif.

Frekuensi pertemuan antara komite audit dan pihak manajemen mencerminkan tingkat keterlibatan dan responsifitas komite audit dalam melaksanakan tugas pengawasannya terkait dengan laporan keuangan perusahaan serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Komite audit bertindak sebagai perpanjangan tangan dewan komisaris dalam memantau aktivitas manajemen, sehingga frekuensi pertemuan yang cukup menjadi indikator penting efektivitas pengawasan. Peningkatan frekuensi rapat komite audit berhubungan baik dengan mutu laporan keuangan dan pengurangan tindakan manipulatif. Dalam sektor pertambangan batu bara, yang menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang besar, peranan komite audit sangat krusial untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan transparansi dan tanggung jawab. Dengan lebih seringnya rapat, komite audit dapat lebih cepat mendeteksi dan menindaklanjuti potensi masalah yang muncul, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan.

Pelaksanaan CSR adalah manifestasi konkret dari prinsip responsabilitas dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. CSR tidak hanya dianggap sebagai kewajiban moral perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan komunitas sekitar, tetapi juga sebagai strategi penting yang dapat memperkuat reputasi serta meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mengevaluasi seberapa jauh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, penelitian ini menggunakan pedoman *Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2016* sebagai dasar. Standar ini dipilih karena merupakan pedoman pelaporan keberlanjutan yang paling komprehensif dan telah digunakan secara luas oleh perusahaan di Indonesia.

GRI 2016 menyediakan 91 indikator pengungkapan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga dinilai mampu menggambarkan pelaksanaan CSR secara menyeluruh. Perusahaan yang menjalankan CSR dengan optimal umumnya menerima lebih banyak pengakuan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Dukungan ini selanjutnya berperan dalam memperbaiki kinerja finansial dan harga pasar perusahaan. Pelaksanaan CSR menjadi salah satu variabel penting untuk melihat sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan dapat berdampak positif dalam industri yang memiliki dinamika dan risiko yang signifikan.

Kehadiran para anggota dewan komisaris yang tidak terlibat dengan pihak internal dalam organisasi manajemen perusahaan sangat penting untuk menjamin kemandirian fungsi pengawasan serta meminimalkan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dewan komisaris berfungsi sebagai otoritas pengendalian internal tertinggi dalam tata kelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi keputusan strategis dari manajemen. (Rusli et al., 2020). Keterlibatan anggota dewan independen memiliki tujuan untuk memastikan adanya pengawasan yang tidak berpihak terhadap kebijakan serta keputusan yang diambil oleh manajemen, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari dalam organisasi. Perusahaan yang memiliki anggota dewan independen yang secara aktif menjalankan fungsinya biasanya menunjukkan hasil keuangan yang lebih baik dan risiko yang dikelola dengan lebih baik. Frekuensi kehadiran komisaris independen dalam rapat menjadi indikator penting dalam mengukur penerapan prinsip independensi dan akuntabilitas dalam kerangka *good corporate governance*.

Kepemilikan oleh institusi merujuk pada bagian saham perusahaan yang dimiliki oleh organisasi profesional seperti pengelola dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi. Jenis kepemilikan ini sering dilihat sebagai metode pengawasan eksternal yang efisien, sebab investor institusi biasanya memiliki keterampilan analisis dan sumber daya yang cukup untuk menilai dan mengawasi kegiatan manajemen dengan lebih teliti. Keberadaan pemegang saham institusional diyakini mampu mendorong manajemen untuk menjalankan aktivitas perusahaan dengan lebih disiplin dan bertanggung jawab. Naiknya bagian investasi dari lembaga bisa memberikan efek yang baik terhadap nilai sebuah perusahaan, termasuk melalui pengawasan yang lebih efisien dan mencegah tindakan oportunistik dari pihak manajer.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak mengkaji hubungan antara mekanisme *Good corporate governance* (GCG) dengan peningkatan nilai perusahaan. Namun demikian, hasil temuan dari berbagai studi tersebut masih menunjukkan ketidak konsistenan. Inkonsistensi ini tidak hanya terbatas pada satu atau dua variabel, melainkan terjadi hampir pada seluruh indikator yang umumnya digunakan untuk merepresentasikan penerapan GCG, seperti kualitas audit, frekuensi rapat komite audit, kehadiran komisaris independen, pelaksanaan *Corporate social responsibility* (CSR), serta kepemilikan institusional. Misalnya, penelitian oleh (Amaliyah & Herwiyanti, 2019) menyimpulkan bahwa komite audit dan komisaris independen tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap nilai perusahaan, sementara CSR dan kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil berbeda ditemukan dalam studi (Nurhalisah & Trisnaningsih,

2024) yang menunjukkan hasil bahwa hanya kepemilikan institusional yang dampak signifikan, sedangkan variabel lainnya tidak.

Penelitian oleh (Putu & Suhandi, 2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan, sementara variabel seperti struktur modal dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh. Di sisi lain, (Saragih & Tampubolon, 2023) melaporkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa belum terdapat konsensus yang jelas tentang peran masing-masing indikator GCG dalam menciptakan nilai perusahaan. Selain itu, mayoritas studi yang ada masih berfokus pada sektor manufaktur, keuangan, atau pada perusahaan secara umum, sedangkan kajian mendalam terhadap sektor pertambangan khususnya sub-sektor batubara masih sangat terbatas. Padahal, sub-sektor batubara memiliki karakteristik industri yang cukup berbeda, seperti tingkat risiko lingkungan yang tinggi, regulasi pemerintah yang ketat, serta sensitivitas terhadap fluktuasi harga komoditas global. Faktor-faktor ini turut memengaruhi proses pengambilan keputusan manajerial dan praktik tata kelola perusahaan.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena menggabungkan beberapa variabel yang sebelumnya diteliti secara terpisah oleh peneliti terdahulu. Variabel kualitas audit diadaptasi dari penelitian (Hana & Paramitha, 2024), frekuensi rapat komite audit dari (Sandy et al., 2020), pengungkapan CSR dari (Afifah et al., 2021), kehadiran komisaris independen dari (Amaliyah & Herwiyanti, 2019), serta kepemilikan institusional dari (Nurhalisah & Trisnaningsih, 2024). Kelima variabel

tersebut sebelumnya belum pernah digabungkan dalam satu model penelitian yang berfokus pada sub-sektor batubara yang tercatat di pasar modal Indonesia periode 2019-2023. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan seluruh dimensi *Good Corporate Governance* (GCG) transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan untuk melihat pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Melalui studi ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip *Good corporate governance* dalam meningkatkan nilai perusahaan pada industri yang memiliki karakteristik khusus dan peran strategis dalam perekonomian nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

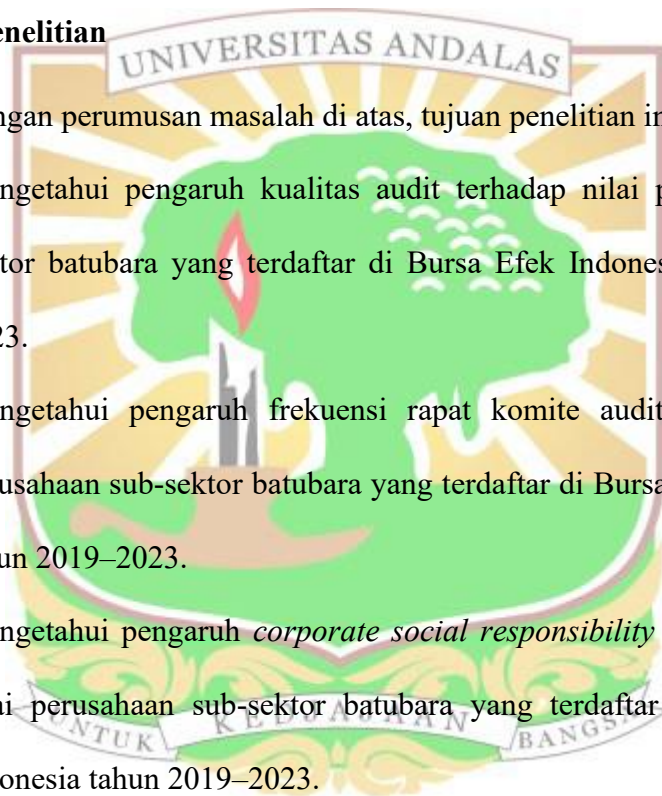
1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023?
2. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023?
3. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023?

4. Apakah tingkat kehadiran rapat komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.
2. Mengetahui pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.
3. Mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.
4. Mengetahui pengaruh kehadiran komisaris independen terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dari perspektif akademis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman di bidang akuntansi dan keuangan, khususnya mengenai analisis dampak kualitas audit, frekuensi rapat komite audit, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), keberadaan anggota dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademis tentang penerapan mekanisme tata kelola perusahaan.

2. Secara praktis

- Bagi perusahaan, hasil kajian ini dapat sebagai masukan dalam mengevaluasi dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
- Bagi investor atau calon investor, penelitian ini dapat menyediakan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan indikator tata kelola perusahaan yang baik.
- Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun penelitian lanjutan yang relevan, baik dengan menambahkan variabel lain, memperluas sektor penelitian, maupun menggunakan metode yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

Bab III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menjelaskan terkait desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, model penelitian dan teknis analisis data dalam penelitian.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil dari pengaruh masing-masing variabel.

Bab V: PENUTUP

Bab ini memaparkan penjelasan kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian dan berisi saran untuk peneliti selanjutnya.